

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut akan terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem pengelolaan negara. Peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah akan makin besar dalam pembangunan wilayahnya.

Dalam menjalankan otonominya, Indonesia mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahannya kepada pemerintah daerah. Desentralisasi ini memberikan dampak adanya suatu perubahan dalam membagikan alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara umum tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan sehingga terciptanya pemerintahan yang efisien dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya (Tana, 2020).

Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mengimplikasikan otonomi daerah ialah pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Labasido, 2019). Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan penompang perolehan pendapatan bagi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola aset dengan baik. Pengelolaan aset telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana ruang

lingkup pengelolaan aset tersebut tidak terlepas dari berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah.

Dalam hal pengelolaan aset tersebut, ada beberapa tahapan atau alur dari manajemen aset yang bisa dilakukan untuk meningkatkan aset-aset yang dimiliki. Manajemen aset atau pengelolaan barang sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan pemerintah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Menurut (Fachrudin, 2017) manajemen aset berupaya melakukan pengoptimalisasian penggunaan aset dalam rangka memberi manfaat dalam pemberian layanan dan pengembalian keuangan. Manajemen aset yang baik akan meminimalkan biaya, memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan utiliti aset. Alur manajemen aset terdiri atas lima tahapan kerja yaitu: (1) inventarisasi aset, (2) legal audit, (3) penilaian aset, (4) optimalisasi aset, dan (5) pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Kelima tahapan kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi, dan akan menjadi variabel dari penelitian ini.

Namun, ada beberapa masalah umum yang sering timbul dalam pengelolaan aset daerah salah satunya adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan aset tersebut, yang menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui dengan pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Selain itu, berdasarkan fakta yang dipaparkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap manajemen aset daerah ada beberapa persoalan yang sering muncul yaitu: (1) Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset belum dioptimalkan (underutilized); (5) Standard operating prosedur (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7)

Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan (Lukito, 2017).

Bengkalis adalah salah satu daerah di Riau yang menjalankan otomoni daerahnya berupa pengelolaan aset-aset daerah yang didapatkan melalui anggaran APBD untuk menunjang kegiatan dan pelaksanaan satuan kerja daerah (SKPD). Aset merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh daerah atau suatu instansi yang memiliki nilai. Aset sangat identik dengan harta kekayaan yang mana harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Apabila aset terpelihara dengan baik, maka nilai dari aset tersebut tidak akan mengalami penurunan dan untuk beberapa aset tertentu bisa ditingkatkan melalui optimalisasi secara efektif dan efisien.

Untuk aset di Bengkalis sendiri, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama 5 tahun terakhir dalam mengelola aset daerah tercermin tidak baik. Tak lepas dari problematika pengelolaan yang muncul dari laporan BPKP atas optimalisasi penggunaan aset Negara/Daerah tentang 3 isu yang seharusnya direkomendasikan kepada Pemda Kabupaten Bengkalis, di antaranya (1) Mengenai penataan kembali administrasi dan penggunaan aset Negara/Daerah, (2) Pengembangan database BMN/D yang akurat dan komprehensif, dan (3) Pengamanan aset Negara/Daerah secara Hukum atau fisik. Namun dalam kenyataannya yang menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban BMN/D adalah Belum terinventarisasinya BMN/D Kabupaten Bengkalis dengan baik. Dalam koridor pengelolaan aset Daerah ini tidak memberikan kontribusi penerimaan bagi Negara maupun Daerah (Burhan, 2020).

Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu memahami dan mengembangkan tujuan utama dari pengelolaan aset daerah yaitu terjadinya optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan atau mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan untuk mencapai pemenuhan pelayanan yang optimal untuk masyarakat sebagai pelayan publik. Baik pengguna maupun pengelola barang punya peran yang sangat penting dalam pengelolaan aset, sehingga kerjasama yang baik sangat diperlukan untuk dapat mengelola dan memanfaatkan aset agar tidak *idle*. Perlu koordinasi dan kerjasama yang baik antara pengguna barang dengan pengelola barang,

penggunaan aset yang tidak optimal dapat menimbulkan potensi kerugian Negara, misalnya jika aset kondisi *idle* tidak terurus maka akan mengalami kerusakan atau degradasi yang mengakibatkan nilai ekonomisnya menurun. Jadi, perlu adanya kesadaran akan pentingnya optimalisasi terhadap aset agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan untuk memperkecil potensi keuangan negara akibat aset negara yang tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut terkait dengan topik tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang sama dari penelitian (Hasanuddin, 2016) namun dengan penambahan pada variabel yang digunakan dan tempat penelitian yang berbeda, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian, Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Bengkalis)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis?
2. Apakah terdapat pengaruh legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis?
3. Apakah terdapat pengaruh penilaian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis?
4. Apakah terdapat pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis?
5. Apakah terdapat pengaruh inventarisasi, legal audit, penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih terfokus dalam menggali masalah pada pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Bengkulu.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu.
5. Untuk mengetahui pengaruh inventarisasi, legal audit, penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi informasi yang bermanfaat serta menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya terkait aset tetap.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah.

4. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi dan acuan serta dapat menambah wawasan mengenai aset tetap.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penulisan yang disajikan. Maka peneliti membuat suatu sistematika penulisan untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian yang disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori serta konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

